

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Profil AKUMANDIRI

AKUMANDIRI merupakan sebuah organisasi yang berdiri pada 10 Juni 2015 dengan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001692.AH.01.07.TAHUN 2016. Organisasi ini beranggotakan pengusaha usaha mikro kecil dan menengah untuk dibina dan diberikan kesempatan dalam tata dunia usaha dan perekonomian di Indonesia.

AKUMANDIRI juga aktif dalam membantu usaha mikro kecil dan menengah yang belum memiliki legal untuk memperkuat daya saing di pasar. Dengan tagline “Tumbuh Bersama meng-INDONESIA-kan INDONESIA”, AKUMANDIRI dan para anggota optimis untuk membantu perekonomian Indonesia, penciptaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta memudahkan kebutuhan hidup didapatkan oleh masyarakat (AKUMANDIRI, 2021c).

Logo AKUMANDIRI didominasi oleh warna biru, merah, dan putih yang memperlihatkan warna biru yang mengikat warna merah putih yang bermakna pulau-pulau Indonesia yang disatukan oleh lautan. Anti logo ini ialah AKUMANDIRI yang akan mengupayakan kesejahteraan bersama dengan menjaga persatuan dan gotong royong yang sesuai dengan UUD 1945 dan pancasila. Logo AKUMANDIRI dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Logo AKUMANDIRI

Sumber: akumandiri.org (2021)

Untuk mendukung perkembangan usaha para anggota, AKUMANDIRI menyediakan dua layanan yakni layanan pelatihan keterampilan dan keahlian dan layanan sertifikasi keanggotaan. Layanan pelatihan keterampilan dan keahlian bertujuan untuk mengembangkan kemampuan teknis, manajerial pelaku IUMKM, serta menumbuhkan penegakan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan usaha. Layanan sertifikasi keanggotaan merupakan fasilitas yang diberikan AKUMANDIRI yang bertujuan agar usaha yang dimiliki para anggota dapat memberikan jaminan barang yang diperjualkan merupakan barang halal, usaha yang dijalankan tidak melanggar hukum (AKUMANDIRI, 2021b).

Layanan lain yang diberikan AKUMANDIRI adalah layanan pengumpulan modal bergulir, layanan mediasi persaingan sehat, layanan informasi kebijakan pemerintah terkait dengan kegiatan usaha, layanan pemberian sertifikasi halal dari MUI, layanan sertifikasi jaminan bahwa makan yang dijual tidak mengandung produk berbahaya, serta layanan makanan aman dikonsumsi oleh anak-anak (AKUMANDIRI, 2021a).

1.1.2 Visi dan Misi

Visi

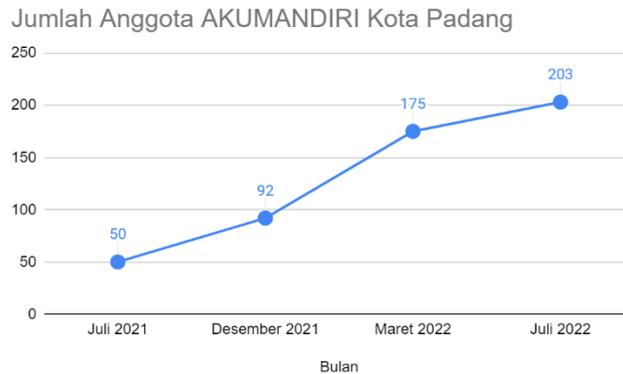
“Menjadikan Koperasi Dan IUMKM sebagai Variabel Signifikan dalam pertumbuhan Perekonomian di Indonesia.”

Misi

1. Melakukan fasilitasi penataan hubungan yang baik antar Koperasi dan pengusaha IUMKM dan seluruh komponen yang terkait peningkatan kemampuan dan kapasitas pengusaha IUMKM di Indonesia pada titik yang memadai untuk menjadikan IUMKM sebagai variabel signifikan dalam perekonomian.
2. Melakukan fasilitasi yang dapat menciptakan proses bisnis IUMKM yang efisien dan ekonomis dalam menyediakan layanan prima kepada pengguna jasa IUMKM sebagai variabel signifikan dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia

1.1.3 Struktur Organisasi

AKUMANDIRI Kota Padang didirikan pada tanggal 5 Januari 2022 dan beralamat di Mal Pelayanan Publik. Jalan Pasa Baru No. 34, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Organisasi ini bertujuan untuk membantu mengelola UMKM di Kota Padang untuk berkembang dan mampu bersaing dalam pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Untuk saat ini ada 203 pelaku usaha yang tergabung dalam AKUMANDIRI Kota Padang. Adapun pertumbuhan anggota AKUMANDIRI Kota Padang dapat dilihat pada gambar 1.2



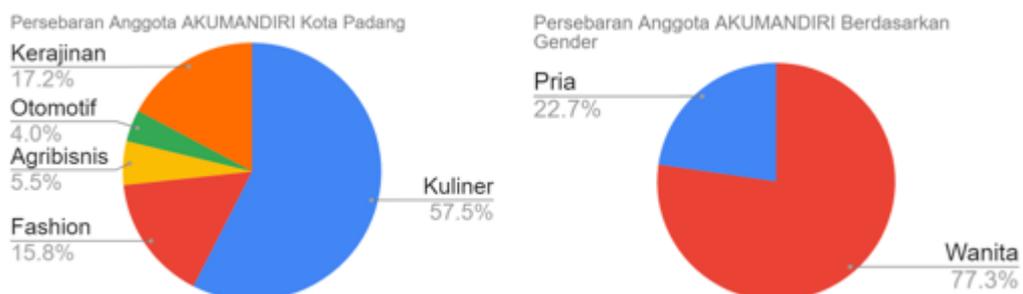
Gambar 1.2 Pertumbuhan Anggota AKUMANDIRI Kota Padang

Sumber: Data Internal AKUMANDIRI Kota Padang (2022)

Hardi Zultani selaku ketua AKUMANDIRI Kota Padang mengungkapkan bahwa asosiasi AKUMANDIRI Kota Padang tidak mengkotakkan pelaku usaha UMKM yang ingin bergabung. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Pada prinsipnya enggak ada pengusaha. Semua pelaku usaha mikro kecil bisa bergabung di AKUMANDIRI, tidak spesifik kuliner dan industry-industri lainnya. Karena pada prinsipnya AKUMANDIRI akan membawahi semua jenis usaha. Karena ini adalah sebuah asosiasi profesi” (Expert Internal, halaman , baris 86-90)

Persebaran Anggota AKUMANDIRI Kota Padang berdasarkan sektor usaha dan gender dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut ini



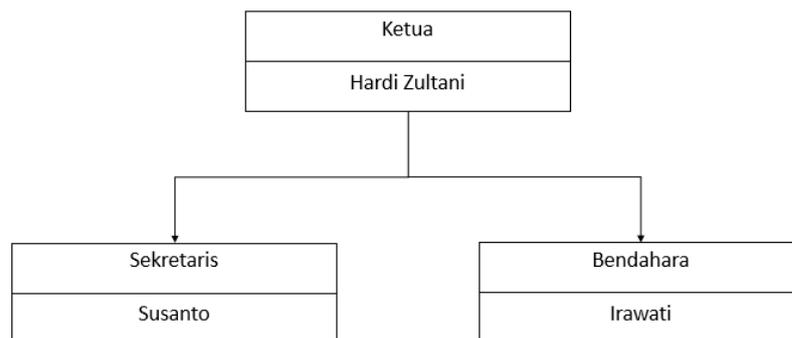
Gambar 1.3 Data Persebaran Anggota AKUMANDIRI Kota Padang

Sumber: Data Internal AKUMANDIRI Kota Padang (2022)

Program kerja AKUMANDIRI yang telah terlaksana antara lain:

1. Pertemuan antara organisasi AKUMANDIRI Kota Padang dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Koperasi Kota Padang dan Dinas Perdagangan Kota Padang.
2. Pertemuan dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengembangan UMKM baik pihak Pemerintah Daerah maupun BUMN.
3. Pelaksanaan bazaar untuk usaha yang terdaftar pada organisasi AKUMANDIRI Kota Padang.
4. Melaksanakan pelatihan untuk anggota secara *online* dan *offline*.

Agar tujuan dari AKUMANDIRI Kota Padang dapat tercapai, organisasi ini dipimpin oleh Bapak Hardi Zultani selaku ketua. Untuk struktur organisasi AKUMANDIRI Kota Padang yang lebih lengkap dapat dilihat pada gambar 1.4



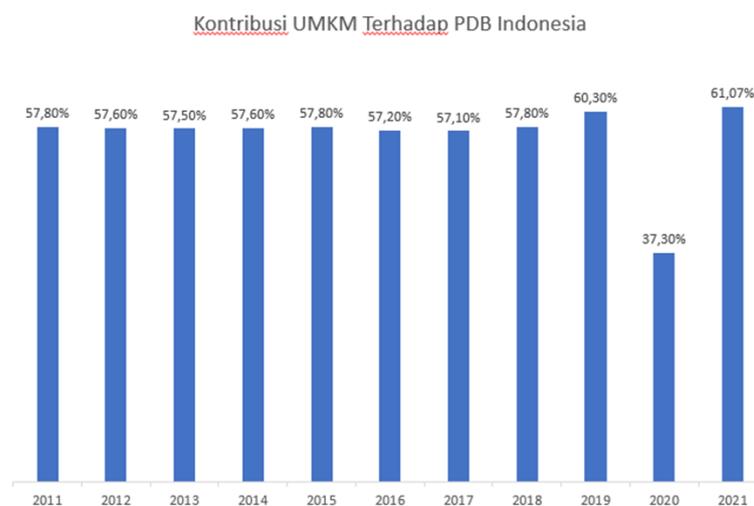
Gambar 1.4 Struktur Organisasi AKUMANDIRI Kota Padang

Sumber: Data Internal Organisasi (2021)

Ketua AKUMANDIRI Kota Padang bertugas untuk merangkul dan membantu UMKM di Kota Padang untuk tumbuh dan berkembang melalui program-program kerja yang diadakan. Sekretaris AKUMANDIRI Kota Padang bertugas untuk mengelola surat yang masuk ke dalam organisasi dan juga surat yang keluar dari organisasi. Bendahara AKUMANDIRI Kota Padang bertugas untuk mengelola dana internal organisasi agar program kerja yang diusulkan dapat terlaksana dengan lancar.

1.2 Latar Belakang Penelitian

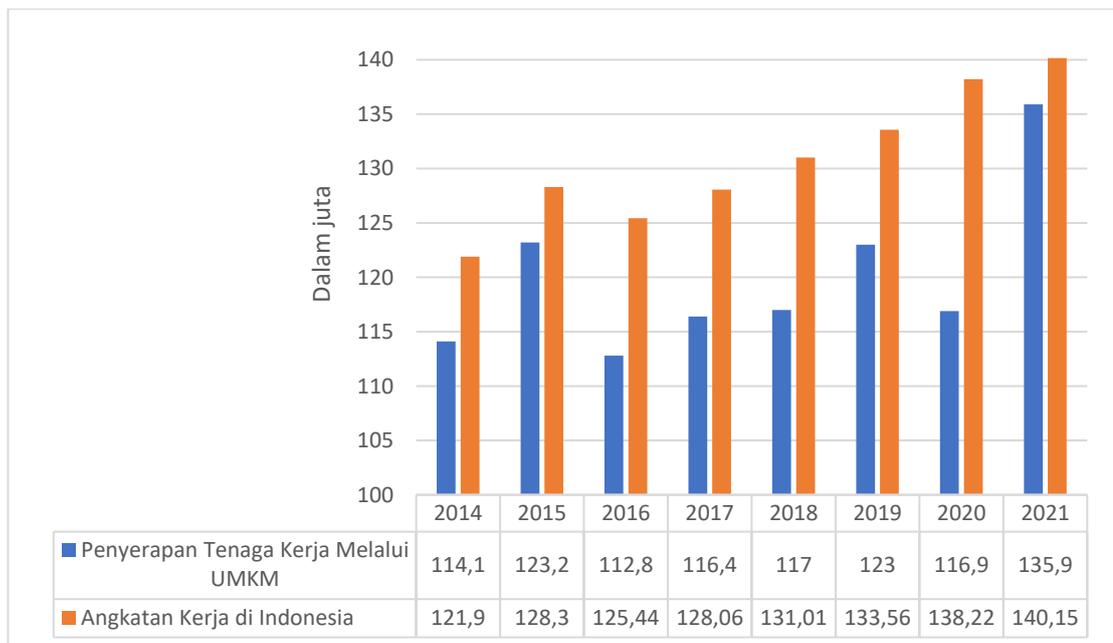
Sektor UMKM di Indonesia memiliki peran penting untuk kemajuan perekonomian. Berdasarkan data kontribusi UMKM terhadap PDB yang telah diperoleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia terlampir pada gambar 1.3 memperlihatkan grafik yang cukup konstan untuk tahun 2011 hingga 2018 di angka 57% atau senilai Rp8.002, 48 triliun dan meningkat signifikan pada tahun 2019 dengan angka 60,3% atau senilai Rp8.465,78 triliun. Di tahun 2020, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto Indonesia hanya sebesar 37,3% atau senilai Rp5.236,71 triliun. Sutrisno Irwanto, peneliti dari *Institute of Developing Entrepreneurship*, berpendapat faktor penyebab rendahnya kontribusi UMKM terhadap PDB tahun lalu yakni pandemi COVID-19 dan regulasi pemerintah dalam pelandaian kurva kasus harian yang menempatkan sektor UMKM pada posisi yang berat (Fauzan, 2021). Untuk tahun 2021, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61,07% dengan nilai Rp8.573,89 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021) yang merupakan kontribusi terbesar yang diberikan UMKM terhadap PDB negara dalam rentang 10 tahun terakhir dan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan kontribusi UMKM pada tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi UMKM terhadap pendapatan bruto Indonesia dari tahun 2011-2021 ditampilkan dalam gambar 1.5



Gambar 1.5 Kontribusi UMKM Indonesia terhadap PDB

Sumber: Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (2021)

UMKM juga membantu menekan angka pengangguran di Indonesia dengan membuka lapangan kerja, hal ini divalidasi oleh Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada siaran pers pada Mei 2021 dengan pernyataan 97% dari total tenaga kerja yang tersedia diserap oleh 64,2 juta total UMKM di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021a). Hal ini merupakan peningkatan yang signifikan semenjak perolehan data terakhir yang menyatakan pada tahun 2019 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta unit usaha dan berhasil menyerap 123 juta tenaga kerja dunia usaha atau sebesar 96% (Karunia, 2021). Adapun data penyerapan tenaga kerja oleh UMKM dan jumlah angkatan kerja di Indonesia ditampilkan pada gambar 1.6.



Gambar 1.6 Penyerapan Tenaga Kerja Melalui UMKM

Sumber: Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik (2021)

Data yang dipublikasikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di tahun 2020 menjelaskan bahwa dari 65 juta unit UMKM di Indonesia, usaha mikro mendominasi dengan persentase 98,68% usaha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 89% dari total tenaga kerja yang diserap oleh UMKM (Kementerian

Keuangan Republik Indonesia, 2020). Hal ini diperkuat oleh data yang diperoleh AKUMANDIRI Kota Padang yang menemukan 92% pelaku usaha mikro membutuhkan bantuan untuk melakukan kegiatan produksi karena kebanjiran pesanan. 82% Pelaku UMKM merekrut keluarga, tetangga, dan kerabat dekat untuk membantu menjalankan usaha dengan alasan ingin membantu perekonomian kolega tersebut. Untuk klasifikasi usaha lainnya, usaha kecil berhasil menyerap 4,84% tenaga kerja dari 123 juta tenaga kerja, usaha menengah menyerap 3,13% tenaga kerja dari 123 juta tenaga kerja, dan usaha besar menyerap 3% tenaga kerja dari 123 juta tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2020).

Menurut Rahadi (2019) berdasarkan fakta lapangan, UMKM yang menjadi penyokong perekonomian Indonesia tidak memiliki pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2014, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa hanya 58,92% UMKM yang mampu memberikan kontribusi kepada negara dari 57,92 juta UMKM yang ada di Indonesia. Riset Fundera menemukan bahwa di tahun 2017, 82% pelaku UMKM mengakui bahwa gagal akibat kehabisan modal dan 46% pelaku UMKM mengakui bahwa tidak mampu mengelola manajemen secara profesional (Putri *et al.*, 2021).

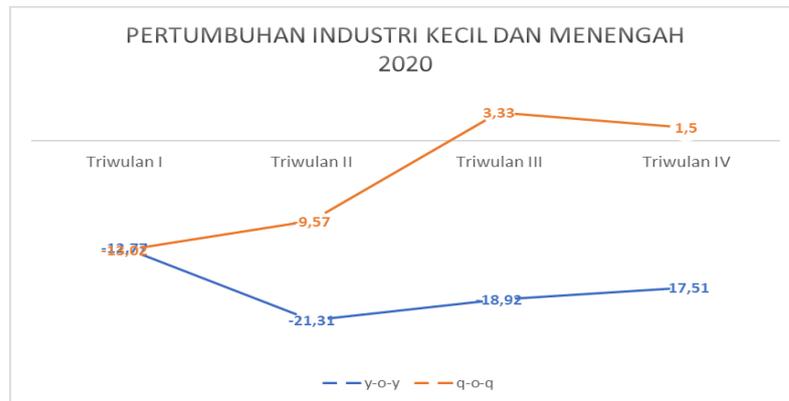
UMKM cenderung gagal pada 5 tahun awal karena tidak memiliki manajemen keuangan yang baik, perencanaan usaha yang kurang, terlalu cepat melakukan ekspansi, gagal memasarkan produk, barang dan jasa yang ditawarkan tidak memiliki diferensiasi, tidak bisa mendelegasikan pekerjaan, dan tidak mementingkan persaingan (Chaney, 2016). Sementara itu, Sandra & Purwanto (2017) menjelaskan bahwa kinerja UMKM dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah seperti penyediaan layanan keuangan khusus untuk UMKM, aspek sosial budaya dan ekonomi seperti pengeksploitasian hasil bumi daerah, dan aspek lembaga terkait seperti lembaga keuangan.

Sebagai contoh, UMKM yang bergerak di bidang pariwisata hampir mengalami kelumpuhan akibat regulasi pemerintah yang menerapkan berbagai bagasi berbayar pada tahun 2019. Rudiana, Wakil Presiden Asosiasi Perusahaan

Penjual Tiket Penerbangan (ASTINDO), menyatakan bahwa usaha yang memproduksi cenderamata dan buah tangan juga akan merasakan dampak kebijakan ini karena wisatawan tidak tertarik melakukan pembelian karena takut beban bagasi yang dibawa bertambah (Aziz, 2019).

Kondisi UMKM semakin memburuk akibat kasus pandemi COVID-19 yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyatakan 47% dari 64 juta UMKM di Indonesia mengalami kebangkrutan dalam satu tahun terakhir (Jelita, 2021). Berdasarkan Katadata Insight Centre, 82,9% UMKM mengakui bahwa terdampak pandemi dan hanya 5,9% UMKM yang mengalami pertumbuhan positif (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021b). Berdasarkan survei LIPI, 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan yang 47,44% dialami oleh usaha *offline*, sebanyak 85,42% pelaku UMKM mengakui bahwa usaha mereka hanya dapat bertahan paling lama satu tahun sejak pandemi (Humas LIPI, 2020). Data yang diperoleh dari AKUMANDIRI Kota Padang juga menunjukkan bahwa 85,7% pelaku UMKM memangkas jumlah karyawan yang bekerja dan 14,3% pelaku UMKM memutuskan hubungan kerja dengan karyawan untuk menghemat pengeluaran usaha.

Hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan 87,5% UMKM di Indonesia terdampak pandemi (Saputra, 2021). Salah satu faktor penyebabnya adalah kebijakan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan masyarakat yang ternyata berpengaruh signifikan terhadap menurunnya pendapatan UMKM. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan 2020, pertumbuhan produksi industri mengalami penurunan akibat terdampak pandemi. Untuk triwulan I-2020 pertumbuhan industri berada pada angka -13,02% dan triwulan II-2020 berada pada angka -9,57%. Pada triwulan III-2020, pertumbuhan industri mikro dan kecil mulai bergerak positif pada angka 3,33% tetapi pada triwulan IV-2020, pertumbuhan mengalami kontraksi dan berada pada angka 1,50%. (Badan Pusat Statistik, 2021). Pertumbuhan industri kecil dan menengah pada tahun 2020 ditampilkan pada gambar 1.7



Gambar 1.7 Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

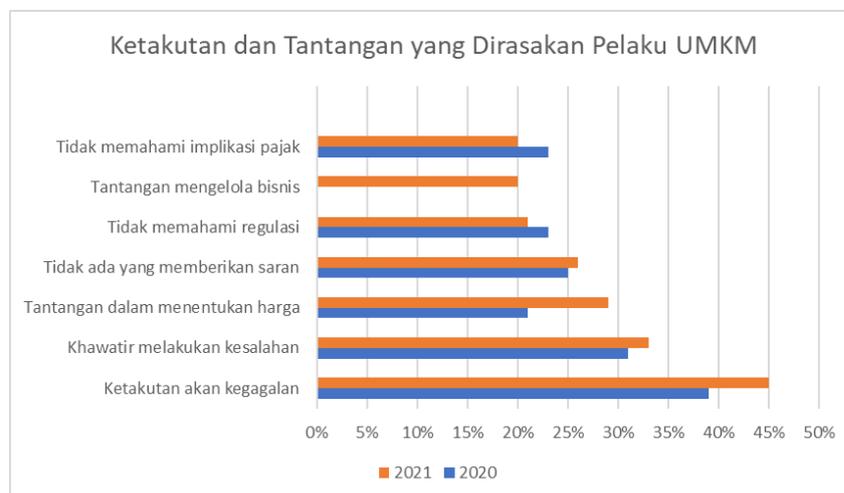
Untuk membantu UMKM, pemerintah memberikan bantuan sosial tunai senilai Rp1,2 Juta per pelaku UMKM sebagai katalis di masa pandemi (Uly, 2021). Akan tetapi, menurut Dr. Hempri Suyatna, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM, kebijakan pemerintah mengenai bansos dan digitalisasi UMKM kurang efektif membantu sektor ini karena UMKM tidak hanya membutuhkan modal kerja tetapi juga jaringan pemasaran dan struktur pengembangan UMKM yang alih profesi atau gulung tikar (Sendari, 2021).

Hambatan berwirausaha yang dialami pelaku usaha di negara berkembang adalah akses keuangan, tarif pajak, persaingan antar usaha, utilitas, dan regulasi (Wang, 2016). Untuk melakukan improvisasi wirausaha, seorang pelaku usaha harus memiliki ilmu yang mumpuni, baik didapatkan secara formal maupun informal agar keputusan yang diterapkan tepat sasaran (Duxbury, 2014). Improvisasi dalam berwirausaha dilakukan apabila terjadi perubahan keadaan secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti pada perubahan teknologi dan pasar (Akgün *et al.*, 2007).

Tak dapat dipungkiri, turbulensi lingkungan bisnis yang dialami UMKM semakin memburuk di tengah pandemi. Turbulensi lingkungan bisnis yang relevan di era digital adalah turbulensi teknologi dan turbulensi pasar. Wishnutama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019-2020), menyatakan bahwa kendala yang dialami UMKM untuk *go digital* yakni kurangnya literasi digital, kurangnya

pengetahuan usaha secara online, ketidaksiapan tenaga ahli yang dimiliki, serta masih awamnya UMKM mengenai pemasaran produk secara daring dan riset pasar (Astutik, 2020). Selain hal-hal tersebut, studi terdahulu temuan Dayan & Benedetto (2011) dan Sayegh *et al.* (2004) menemukan adanya pengaruh signifikan antara turbulensi lingkungan bisnis dengan respon emosional (stress dan ketakutan) pelaku usaha. Pendapat tersebut didukung oleh Shabbir *et al.* (2021) yang mengemukakan bahwa respon emosional yang terjadi akan mempengaruhi tingkat kreativitas pekerja, tingkat pemahaman informasi, serta tingkat pengendalian informasi.

Berdasarkan survei yang dilakukan Bizfilings (2021) terhadap 400 UMKM, 45% pelaku usaha mengakui mengalami ketakutan akan kegagalan usaha, 33% pelaku usaha mengakui kekhawatiran apabila melakukan kesalahan, 29% pelaku usaha tidak tahu cara menetapkan harga, 26% pelaku usaha tidak mendapatkan saran ataupun nasihat dalam menjalankan usaha. Survei ini dilakukan selama 2 tahun berturut-turut dan mendapatkan beberapa perubahan pada beberapa indikator. Hasil lengkap survei ditampilkan pada gambar 1.8



Gambar 1.8 Ketakutan dan Tantangan yang Dirasakan Pelaku UMKM

Sumber: Bizfilings (2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 5 UMKM yang gagal di masa pandemi, penulis menemukan bahwa kegagalan usaha disebabkan oleh lemahnya pelaku usaha dalam mengimprovisasi usaha, keterbatasan dana, dan

buruknya sistem manajerial. Usaha A yang bergerak dalam usaha oleh-oleh mengalami kebangkrutan karena tidak mampu mengelola dana usaha yang mengakibatkan pemilik usaha membuka hutang dimana-mana. Usaha B yang bergerak dalam usaha olahan kopi mengalami kebangkrutan karena tidak mampu mengelola sumber daya dengan baik sedangkan usaha ini mencapai 100 pcs pesanan saat *soft-launching*. usaha C yang bergerak pada dalam usaha makanan mengalami kebangkrutan akibat tidak mampu berimprovisasi dengan regulasi pembatasan sosial yang ditetapkan pemerintah. usaha D yang bergerak dalam usaha pecel lele mengalami kebangkrutan akibat tidak dapat mengikuti permintaan konsumen dan berujung pada konflik internal. Usaha E yang merupakan usaha kelontong mengalami kebangkrutan akibat terlalu banyak inventori. Rangkuman *preliminary data* ini akan ditampilkan pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Penyebab Kegagalan Usaha

No	Nama Usaha	Jenis Usaha	Alasan Kegagalan
1	Usaha A	Usaha oleh-oleh	Tidak mampu mengelola dana usaha
2	Usaha B	Usaha kopi	Tidak mampu mengelola sumber daya dengan baik
3	Usaha C	Usaha makanan	Tidak mampu melakukan improvisasi akibat regulasi pemerintah
4	Usaha D	Usaha pecel lele	Tidak mampu mengikuti permintaan konsumen dan berujung pada konflik internal
5	Usaha E	Usaha kelontong	Terlalu banyak memiliki inventori

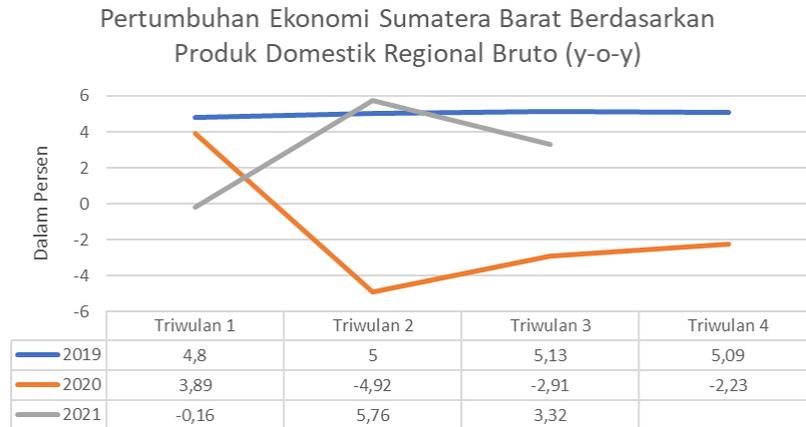
Sumber: Data Olahan Peneliti (2021)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan berwirausaha yang mengakibatkan pelaku usaha sulit melakukan improvisasi di masa pandemi melalui aspek eksternal yang berupa turbulensi teknologi dan turbulensi pasar serta aspek internal yang berupa ketakutan akan kegagalan usaha. Dengan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Hambatan Improvisasi Berwirausaha pada Usaha Mikro Industri Rumah Tangga di Kota Padang (Studi Kasus pada Anggota AKUMANDIRI Kota Padang)”

1.3 Perumusan Masalah

Dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh Provinsi Sumatera Barat. Pada triwulan II-2020, pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat menurun sangat tajam di angka minus 4,92% dibandingkan triwulan II-2019 yang meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB sektor usaha perdagangan di Provinsi Sumatera Barat pun mengalami penurunan di angka -3,36% dibandingkan triwulan II-2019 yang meningkat 7,53% dibanding tahun sebelumnya (Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, 2021). Salah satu penyebab penurunan ini karena ditutupnya Pasar Raya Padang - satu dari beberapa pusat perekonomian di Sumatera Barat - akibat kelalaian masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan. Pasar Raya Padang menjadi klaster penyebaran COVID-19 terbesar untuk area Sumatera Barat dengan teridentifikasinya 234 kasus dari 567 total kasus positif yang ada di Sumatera Barat (CNN Indonesia, 2020)

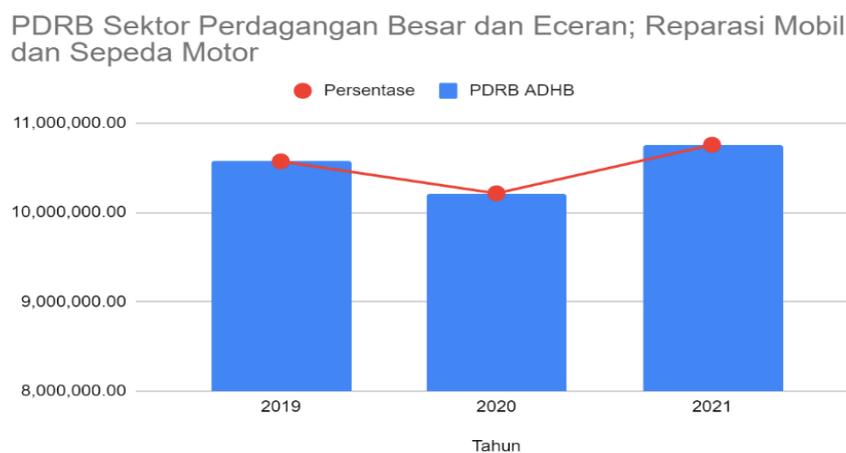
Meskipun pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada Triwulan III-2021 telah bertumbuh sebesar 3,32% dibandingkan Triwulan III-2020 tetapi pelaku UMKM masih merasakan sesak akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan pemerintah. Para pelaku UMKM ini melakukan aksi demonstrasi agar pemerintah dan masyarakat yang masih kurang peduli terhadap protokol kesehatan dapat mendengarkan keluhan yang dialami pelaku usaha dan bersama-sama menurunkan tingkatan PPKM Kota Padang dari *level* 4 menjadi *level* yang lebih rendah (Tanjung, 2021). Berikut ditampilkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan produk domestik regional (y-o-y) periode 2019-2021 pada gambar 1.9



Gambar 1.9 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (y-o-y)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2021)

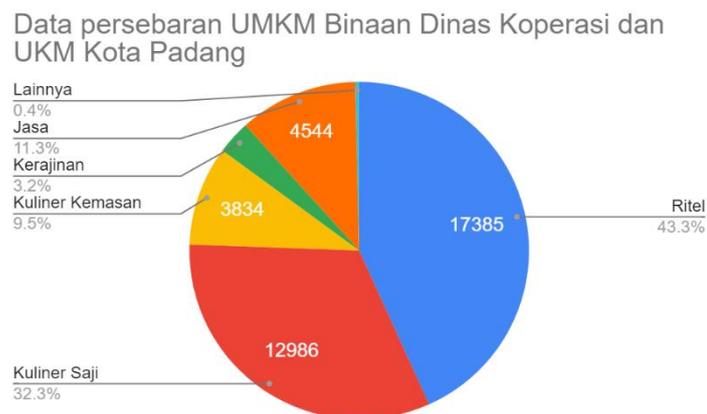
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Katadata (2021), Kota Padang menempati urutan pertama sebagai kontributor perekonomian Sumatera Barat dengan nilai sebesar Rp62,22 Triliun untuk PDRB atas harga berlaku yang mana ekuivalen dengan 25,7% PDRB Sumatera Barat. Sektor usaha yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian Kota Padang adalah sektor perdagangan besar dan eceran juga sektor transportasi dan perdagangan. Gambaran mengenai distribusi PDRB di Kota Padang dapat dilihat pada gambar 1.10 berikut



Gambar 1.10 Distribusi PDRB Kota Padang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang (2022)

Hendri Septa, Walikota Padang, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Padang bergerak ke arah positif. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya perekonomian dari angka -1,86% pada tahun 2020 ke angka 3,66% di tahun 2021. Untuk tahun 2022, Walikota Padang memiliki target agar perekonomian Kota Padang mampu mencapai angka 3,14%. Dalam program memulihkan ekonomi ini, Pemerintah Kota Padang meningkatkan *bandwith supply* bagi kantor pemerintah dan meningkatkan penggunaan pembayaran non tunai (Rinaldy & Suryani, 2022). Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang juga mengerahkan upayanya dalam perbaikan perekonomian Kota Padang dengan melakukan pemberdayaan UMKM terdampak pandemi COVID-19. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang (2022), dari 40.640 usaha mikro binaan di Kota Padang, kuliner saji berjumlah 12.986 usaha dan kuliner kemasan berjumlah 3.834 usaha. Adapun data persebaran UMKM di Kota Padang dapat dilihat pada 1.11 berikut



Gambar 1.11 Data persebaran UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang (2022)

Akan tetapi, agar tujuan untuk pemulihan ekonomi Kota Padang dapat tercapai, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang harus menghadapi tantangan berupa penurunan jumlah usaha mikro. Semenjak pandemi COVID-19, terjadi penurunan jumlah UKM yang signifikan yakni sebesar 5,94% (Rosa & Idward, 2021). Untuk mendukung Program pemerintah Kota Padang, AKUMANDIRI Kota

Padang melakukan survei untuk memetakan kendala berwirausaha yang dialami oleh usaha mikro yang tergabung selama pandemi. Data tersebut menunjukkan 35,7% pelaku UMKM mengakui bahwa kesulitan mengikuti perkembangan teknologi dengan alasan pesatnya perkembangan teknologi, 21,4% pelaku UMKM mengakui bahwa kesulitan mengikuti permintaan konsumen karena memiliki permasalahan dengan pengaturan inventaris dan perubahan selera konsumen. Semenjak adanya pandemi, 57,1% pelaku UMKM mengakui bahwa takut apabila usaha yang dijalankan gulung tikar hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan omzet dan sulitnya memperoleh bahan baku. Sebanyak 71,4% pelaku UMKM mengakui bahwa melakukan improvisasi wirausaha agar usaha yang dilakukan dapat bertahan di masa pandemi.

Setelah melakukan wawancara dengan pelaku usaha untuk memperoleh *preliminary data*, penulis menemukan bahwa keputusan yang diterapkan para pelaku UMKM Industri Rumah Tangga selama pandemi antara lain menggunakan sistem *pre-order* agar bahan baku yang digunakan tidak terbuang sia-sia, mendaftarkan toko pada *e-commerce*, serta menyusutkan pegawai untuk menghemat pengeluaran usaha.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hambatan eksternal yang dihadapi pelaku usaha di bawah pembinaan AKUMANDIRI dalam aspek turbulensi teknologi dan turbulensi pasar?
2. Bagaimana hambatan internal yang dihadapi pelaku usaha di bawah pembinaan AKUMANDIRI dalam aspek ketakutan akan kegagalan usaha, kecemasan, kekecewaan, *distress* dan ketegangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui hambatan eksternal yang dihadapi pelaku usaha di bawah pembinaan AKUMANDIRI dalam aspek turbulensi teknologi dan turbulensi pasar.
2. Untuk mengetahui hambatan internal yang dihadapi pelaku usaha di bawah pembinaan AKUMANDIRI dalam aspek ketakutan akan kegagalan usaha, kecemasan, kekecewaan, dan ketegangan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Akademis

a. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini menambahkan respon emosional pengusaha yang sering terabaikan oleh penelitian sebelumnya yakni kecemasan, kekecewaan, dan tekanan. Dengan penggunaan metode wawancara, diharapkan penelitian ini memiliki *insight* yang lebih dalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi improvisasi kewirausahaan.

b. Penelitian di Masa yang Akan Datang

Penelitian ini dapat menjadi pedoman dan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan riset lebih lanjut yang memiliki topik dan pembahasan yang serupa. Selain itu, variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam membuat alat ukur untuk penelitian selanjutnya yang dilakukan dengan metode kuantitatif.

1.5.2 Aspek Praktis

a. AKUMANDIRI Kota Padang

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada AKUMANDIRI Kota Padang untuk mengetahui gambaran kinerja pelaku UMKM saat menjalankan dan memimpin usaha berdasarkan analisis yang sudah dilakukan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk AKUMANDIRI Kota Padang dalam menyusun program-program pembinaan UMKM agar lebih efektif dan efisien.

b. UMKM

Penelitian ini membantu pelaku usaha untuk mengambil keputusan yang tepat agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan bertahan dalam segala jenis guncangan baik dari segi internal maupun eksternal. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi UMKM dalam menyusun strategi usahanya sehingga lebih adaptif untuk diimplementasikan di kondisi "New Normal"

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis mengobservasi 6 pelaku usaha UMKM yang terdaftar pada organisasi AKUMANDIRI Kota Padang.

1.6.2 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis berdurasi 8 bulan, dimulai dari 1 Oktober 2021 hingga 31 Mei 2022. Hal ini bertujuan agar mendapatkan data yang jenuh sehingga hasil penelitian dapat maksimal.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat menemukan kesenjangan penelitian dan

menentukan posisi penelitiannya. Dalam bab ini juga membahas proses pembentukan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, operasional variabel, tahapan penelitian, situasi sosial, pengumpulan data beserta sumber data, validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan mengenai karakteristik responden dan hasil penelitian. Data tersebut dianalisis dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan usulan saran dalam aspek akademis dan praktis.